

Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik

Sarah Bakara¹, Maya Wulandari², Eliza Handayani Lubis³, Armin Rahmansyah Nasution⁴,
Juanda Maulana⁵, Siti Naila Rahmi⁶, Jelita Simanungkalit⁷

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

E-mail : sarahbakara02@gmail.com, wulandariimaya07@gmail.com, elizahandayani48@gmail.com,
armin@unimed.ac.id, juannasution12@gmail.com, nailarahmii119@gmail.com,
jelitafebiola14@gmail.com.

Article History:

Received: 01 November 2024

Revised: 15 November 2024

Accepted: 18 November 2024

Keywords: Role of
Government, Public Goods

Abstract: This article aims to analyze the role of the government in providing public goods as a form of service to the community. The government has a crucial role in the provision of public goods, which includes the functions of allocation, distribution, and stabilization. In this context, public goods are defined as goods that can be enjoyed by everyone without reducing their availability to others (non-rivalrous and non-excludable). In accordance with the purpose of this study, which is to find out the role of the government in the availability of public goods. The type of data used in this study is secondary data, secondary data according to Sugiyono (2016:225) is a source of data that does not directly provide data to data collectors, for example through other people or through documents. And those that become secondary sources of data are books, articles, journals related to research.

PENDAHULUAN

Pemerintah sangat bertanggung jawab atas ketersediaan dan penyediaan barang publik. Ketersediaan barang publik merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang publik adalah barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, seperti jalan raya, pertahanan nasional, dan layanan kesehatan. Peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan barang publik ini menjadi sangat penting, terutama karena sektor swasta tidak selalu mampu atau bersedia menyediakan barang-barang tersebut secara memadai. Penyediaan barang publik dalam jumlah yang besar membuat kriteria barang publik wajib untuk diprioritaskan, sehingga semua kebutuhan masyarakat akan barang public mampu dipenuhi oleh pemerintah. Barang publik memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Pentingnya peran pemerintah dalam penyediaan barang public tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, barang publik didefinisikan sebagai barang yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, yang dikenal dengan karakteristik non-rivalrous dan non-excludable. Ini berarti bahwa penggunaan barang publik oleh satu individu tidak mengurangi akses individu lain terhadap barang tersebut, dan tidak ada individu yang dapat dibatasi dari mengakses barang tersebut.

Pemerintah harus melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam proses penyediaan barang publik. Fungsi alokasi berhubungan dengan cara pemerintah menentukan jenis dan jumlah barang publik yang perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi distribusi berfokus pada pemerataan akses dan manfaat dari barang publik, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan pemeliharaan keseimbangan ekonomi dan sosial melalui penyediaan barang publik yang memadai. Dengan memahami peran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitas layanan publik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan barang publik serta strategi yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan perannya. Menurut ahli ekonomi, Samuelson, barang publik memiliki karakteristik non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Non-rivalitas berarti konsumsi barang publik oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya. Sementara non-eksklusivitas berarti tidak ada cara untuk mencegah seseorang mengonsumsi barang publik, bahkan jika orang tersebut tidak membayar. Pemerintah dapat mengatasi masalah non-rivalitas dan non-eksklusivitas melalui penyediaan langsung, subsidi, atau regulasi.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Barang Publik

Barang publik didefinisikan sebagai barang yang memiliki karakteristik tidak bersaing (non-rivalry) dan tidak dapat dikecualikan (non-excludability) dalam penggunaannya (Samuelson & Nordhaus, 2010). Karakteristik non-rivalry berarti bahwa konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan barang tersebut bagi individu lainnya, sementara non-excludability menunjukkan bahwa tidak memungkinkan untuk mengecualikan seseorang dari penggunaan barang tersebut setelah tersedia. Kedua sifat ini, menurut Stiglitz & Rosengard (2015), membedakan barang publik dari barang privat, menjadikannya tersedia secara luas bagi semua orang tanpa hambatan akses dan tanpa menurunkan kualitas atau kuantitas bagi pengguna lain.

2. Peran Pemerintah

Dalam ekonomi publik, Musgrave (2009) menyatakan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Hal ini penting karena, menurut Mankiw (2012), pasar sering gagal menyediakan barang publik akibat masalah free rider yang muncul dari sifat non-rivalry dan non-excludability barang publik. Fungsi distribusi mencakup pembagian pendapatan dan kekayaan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan. Sementara itu, fungsi stabilisasi berfokus pada penggunaan kebijakan ekonomi makro untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan pengangguran. Ketiga fungsi ini saling mendukung untuk memastikan perekonomian berjalan efisien, adil, dan stabil.

3. Efisiensi Dalam penyediaan Barang publik

Kinerja Penyediaan Barang Publik Pemerintah lokal dapat menyediakan barang publik secara efisien dengan bantuan model Tiebout (1956). Model ini menunjukkan bahwa kompetisi antar pemerintah daerah dan mobilitas penduduk dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik lokal. Menurut Rosen & Gayer (2014), ketika marginal keuntungan sosial sama dengan marginal biaya sosial, penyediaan barang publik menjadi efisien. Namun, mengukur preferensi masyarakat terhadap barang publik adalah masalah yang berbeda, karena masalah preferensi

terbuka tidak dapat diterapkan pada barang privat.

4. Tantangan Dalam penyediaan Barang Publik

Penyediaan barang publik menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Ostrom (2010) mengidentifikasi beberapa masalah utama, termasuk free rider, di mana individu menikmati manfaat barang publik tanpa berkontribusi pada pembiayaannya, yang dapat menghambat penyediaan barang tersebut secara optimal. Selain itu, sulit untuk mengukur preferensi publik karena masyarakat memiliki kebutuhan dan keinginan yang beragam, sehingga pemerintah sering kali kekurangan data yang akurat untuk membuat keputusan. Keterbatasan anggaran negara juga menjadi kendala, karena sumber daya yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik secara menyeluruh. Kegagalan sistem birokrasi, seperti inefisiensi dan korupsi, juga dapat menghambat pengelolaan dan distribusi barang publik. Bailey (2002) menambahkan bahwa pemerintah menghadapi kesulitan dalam menentukan jumlah barang publik yang ideal untuk diberikan, mengingat preferensi masyarakat yang beragam dan keterbatasan informasi yang dimiliki. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dan transparan dalam pengelolaan barang publik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan, merangkum sejumlah data yang masih mentah dan data yang terkini berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah dalam ketersediaan barang publik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder menurut Sugiyono (2016:225) merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, artikel, jurnal yang berkenaan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah berkewajiban menyediakan barang publik (Anomaly, 2013; Ozdemir, Johnson, & Whittington, 2016). Penyediaan barang publik semestinya “murni” dan harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai pertimbangan juga mendasari kenapa barang publik juga dikelola oleh swasta. Perbedaan penting antara barang publik, barang semi publik, barang semi swasta, dan barang pribadi dilihat dari kebijakan pola penyediaan barang diuraikan sebagai berikut:

- Barang publik (public goods)

Barang publik, yang memiliki sifat non-rival dan non-excludable, seharusnya disediakan oleh pemerintah. Lembaga nonprofit berperan dalam redistribusi, di mana individu yang membayar untuk barang tersebut tidak selalu menjadi satu-satunya penerima manfaatnya (Witesman, 2016). Tanggung jawab pemerintah adalah mendistribusikan barang publik kepada masyarakat, tetapi barang tersebut tidak akan dapat dinikmati secara gratis jika organisasi nonprofit telah diprivatisasi.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi terkait barang publik adalah bahwa barang tersebut tidak akan pernah menguntungkan bagi negara, karena biaya produksinya. Oleh karena itu, barang publik harus memberikan nilai tambah bagi negara, meskipun harus dibayar oleh masyarakat. Selain itu, dalam konteks ekonomi yang selalu mencari keuntungan, barang publik tidak lagi dapat diperoleh secara gratis. Pemerintah juga harus mempertimbangkan bagaimana

menentukan barang mana yang bisa diberikan secara gratis, terutama ketika pendapatan negara masih bergantung pada pajak yang dipungut. Kondisi ini membuat istilah barang publik tidak hanya sekadar label. Untuk memastikan ketersediaan barang publik, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah, seperti mengatur perilaku individu yang memiliki wewenang, mengubah perilaku melalui peraturan yang mendukung masyarakat, dan memulihkan biaya ketersediaan barang publik dengan mengalokasikan kembali pajak penghasilan ke sektor lain (Berg, 2011). Di sisi lain, barang publik harus dikelola oleh negara dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta.

- **Barang Semi Publik**

Barang semi publik atau common goods merupakan konsep yang berkaitan dengan keadilan dan kini menjadi bagian dari wacana politik filosofis (Murphy & Parkey, 2016; Vazquez & Gonzalez, 2016). Barang ini memiliki karakteristik non-excludable tetapi rival, seperti yang terlihat dalam eksploitasi sumber daya alam. Contohnya adalah hutan; meskipun kita tidak dapat mencegah orang lain untuk mengambil hasil hutan, pengambilan yang berlebihan akan mengurangi jumlah hasil yang tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi orang lain untuk menikmati udara segar, yang dihasilkan oleh hutan sebagai penyangga iklim. Kasus ini menunjukkan bagaimana individu dapat mengambil keuntungan secara pribadi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Proses yang tepat seharusnya mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam jangka panjang. Gambaran ini menjadi penting karena eksploitasi yang berlebihan dapat menimbulkan masalah bagi kelangsungan berbagai ekosistem yang terpengaruh. Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian publik, terutama sebagai pihak yang dapat dipercaya dalam menyediakan regulasi yang mengatur sektor swasta.

Teori klasik mengenai penyediaan barang publik telah dibahas dalam berbagai literatur ilmiah, baik dalam bentuk definisi maupun perspektif yang berbeda. Beberapa tokoh penting dalam teori ini termasuk Pigou, Bowen, Lindahl, Samuelson, serta teori anggaran yang dikembangkan oleh Adams, Willoughby, dan Wildavsky. Konsep barang publik dan barang pribadi awalnya muncul dalam kajian ekonomi neoklasik, dengan banyak literatur klasik yang membahasnya dari sudut pandang ekonomi, seperti karya Samuelson, Buchanan, Head & Shoup, Foley, Musgrave & Musgrave, dan Varian. Dalam konteks ekonomi, pemahaman tentang barang publik berkaitan dengan masalah mikroekonomi, yang mencakup distribusi produksi, alokasi, dan konsumsi barang. Teori Pigou menyatakan bahwa barang publik harus disediakan hingga tingkat di mana kepuasan marginal dari barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akibat pajak yang dikenakan untuk membiayainya. Sementara itu, teori Bowen berfokus pada penyediaan barang publik berdasarkan prinsip harga yang sama seperti barang swasta. Teori Lindahl mirip dengan teori Bowen, tetapi membedakan pembayaran konsumen dalam bentuk persentase dari penyediaan barang publik, bukan harga absolut. Teori Samuelson menekankan bahwa meskipun barang publik memiliki karakteristik non-excludable dan non-rival, perekonomian masih dapat mencapai kondisi pareto atau tingkat kesejahteraan yang optimal. Teori anggaran berfokus pada analisis penyediaan barang publik yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan distribusi pendapatan melalui pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Saat ini, isu barang publik juga telah berkembang menjadi kajian analisis kebijakan, yang merespons kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai teori ini menjelaskan barang publik dari perspektif penyediaan, kepuasan, harga pasar, metode pembayaran, dan karakteristik barang itu sendiri. Istilah "barang publik" sering digunakan untuk merujuk pada jenis barang yang serupa dengan pertahanan nasional.

Selain itu, istilah lain yang kadang digunakan adalah "collective goods" dan "social goods." Istilah "collective goods" memberikan konotasi tambahan yang mencakup konsep penggunaan bersama yang dilakukan secara simultan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi perekonomian ketika terjadi kegagalan pasar, seperti monopoli, oligopoli, eksternalitas, informasi asimetris, dan keterbatasan barang publik. Selain itu, pemerintah juga berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan secara adil di masyarakat. Di tengah globalisasi, peran ini semakin penting, termasuk dalam perencanaan strategis, menciptakan lingkungan yang menarik bagi sektor swasta, privatisasi perusahaan negara, dan pembuatan regulasi untuk mencegah krisis dan kegagalan pasar. Pemerintah juga dapat melakukan intervensi dalam perekonomian untuk beberapa tujuan, seperti: (1) mengoreksi kekurangan atau kelebihan sumber daya; (2) menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar; (3) mengatur dan memperbaiki ketidakseimbangan serta inefisiensi; (4) melindungi individu dan kelompok masyarakat serta menyediakan perlindungan sosial; (5) mengurangi kemiskinan; dan (6) mengatur hak kepemilikan. Dalam sistem perekonomian modern, fungsi ekonomi pemerintah menurut perspektif ekonomi publik terbagi menjadi tiga kategori utama: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Masing-masing fungsi ini memiliki keterkaitan yang berbeda, sebagai berikut:

- a) Fungsi Alokasi : Terkait erat dengan penyediaan dan pelayanan barang publik yang digunakan secara bersama dan tidak dapat dimiliki secara individu
- b) Fungsi Distribusi : Berfokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan yang optimal.
- c) Fungsi Stabilisasi : Berkaitan dengan pengaturan variabel ekonomi makro untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional.

A. Peran Dalam Alokasi

Dalam konteks alokasi, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui belanja publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup penyediaan barang publik, mendorong investasi swasta, dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang produktif. Penyediaan barang publik sangat penting, karena tidak semua barang dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang publik memiliki karakteristik non-eksklusif, di mana manfaatnya dapat dinikmati oleh semua orang, seperti udara bersih dan infrastruktur umum. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang tidak dapat dipenuhi secara efektif oleh mekanisme pasar.

Ada beberapa alasan yang mendasari intervensi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya, antara lain:

1. Ketidaksesuaian dengan Asumsi Ekonomi: Dalam kondisi di mana pasar tidak beroperasi dalam persaingan sempurna, pemerintah perlu campur tangan untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal.
2. Eksternalitas : Ketika produksi atau konsumsi suatu barang berdampak pada pihak lain, pemerintah dapat mengatur melalui pajak dan subsidi.
3. Dorongan Konsumsi : Pemerintah cenderung mendorong konsumsi barang yang diinginkan banyak orang melalui subsidi, sementara menghambat konsumsi barang yang kurang diminati dengan kebijakan pajak.

Barang publik juga dibedakan menjadi barang publik lokal dan nasional. Barang publik lokal disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh penduduk setempat, sedangkan barang

publik nasional disediakan oleh pemerintah pusat dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di negara tersebut. Alasan mendukung peran alokasi oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Perpindahan Penduduk : Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan di daerah dapat menyebabkan perpindahan penduduk, yang berdampak pada penyediaan lokal.
2. Kesesuaian dengan Kebutuhan Lokal : Penyediaan oleh pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat dibandingkan dengan penyediaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

B. Peran Dalam Distribusi

Dalam konteks distribusi, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya. Ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pajak, jaminan sosial, dan pelayanan publik untuk memengaruhi distribusi pendapatan. Tugas ini tidaklah mudah, karena berkaitan erat dengan isu keadilan, yang merupakan konsep kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Persepsi masyarakat terhadap keadilan juga beragam, menjadikannya sebagai masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan redistribusi pendapatan bertujuan untuk memperbaiki ketidakmerataan yang ada dalam masyarakat. Dalam pengambilan keputusan publik, sering kali terdapat trade-off antara efisiensi dan keadilan. Kebijakan yang diambil akan lebih efektif jika kelompok yang diuntungkan dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, sehingga posisi pihak yang dirugikan tetap terjaga. Pemerintah dapat memengaruhi distribusi pendapatan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya, melalui pajak progresif, di mana pajak yang dikenakan lebih tinggi bagi orang kaya dan lebih rendah bagi orang miskin, disertai dengan subsidi untuk kelompok berpenghasilan rendah. Sedangkan secara tidak langsung, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pengeluaran, seperti pembangunan perumahan bersubsidi untuk kelompok tertentu, atau memberikan subsidi untuk kebutuhan pertanian, seperti pupuk bagi petani. Kewenangan dan dukungan terhadap peran pemerintah daerah dalam fungsi distribusi ini tidak sebesar kewenangan dan dukungan dalam fungsi alokasi. Kecilnya kewenangan dan dukungan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam fungsi distribusi ini adalah didasarkan pada asumsi bahwa bila pelimpahan kewenangan dan dukungan cukup besar maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang seragam di beberapa daerah karena akan kurang memberikan inovasi dan rangsangan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki atau yang tersedia di daerahnya. Karena dalam kenyataannya daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah lainnya yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing.

C. Peran Dalam Stabilisasi

Fungsi stabilisasi, seperti namanya, bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi di suatu negara. Fungsi ini sangat terkait dengan pengaturan variabel ekonomi makro melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kegiatan stabilisasi bertujuan untuk meningkatkan atau mengurangi permintaan agregat, sehingga dapat menjaga full employment dan menghindari masalah seperti inflasi dan deflasi. Peran pemerintah dalam stabilisasi sangat penting ketika terjadi gangguan dalam kestabilan ekonomi, seperti inflasi, deflasi, atau penurunan permintaan dan penawaran barang. Masalah-masalah ini dapat memicu isu lain, seperti pengangguran, kemiskinan, resesi, depresi, dan stagflasi. Dalam perekonomian, sering terjadi fluktuasi ekonomi yang sulit diprediksi, dan fluktuasi yang paling tidak diinginkan adalah resesi

dan depresi. Untuk mengurangi dampak dari kondisi tersebut, pemerintah berfungsi sebagai stabilisator melalui kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi lainnya. Salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah penggunaan belanja pemerintah, baik dalam bentuk ekspansi maupun kontraksi fiskal, untuk mengendalikan perekonomian. Di antara tiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi memiliki kewenangan dan dukungan yang paling kecil terhadap peran pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fungsi stabilisasi dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi juga disebabkan oleh efek samping yang muncul dari penggunaan instrumen kebijakan moneter dan fiskal untuk mengontrol variabel ekonomi makro. Sebagai contoh, jika kebijakan moneter didecentralisasikan, masing-masing pemerintah daerah akan memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan sesuai kebutuhan mereka. Jika setiap daerah diizinkan mencetak uang sesuai keinginan mereka, maka pemerintah pusat akan kesulitan dalam menjaga kestabilan harga dan tingkat inflasi. Begitu pula, jika kebijakan fiskal didecentralisasikan, akan ada perbedaan dalam penetapan pajak dan pengeluaran, yang dapat menyebabkan migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain demi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Barang publik seharusnya dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat, namun saat ini hal tersebut masih sebatas teori. Proses privatisasi yang berlangsung telah mengubah makna barang publik yang seharusnya bersifat non-excludable dan non-rival. Dalam mekanisme pasar, pemerintah terpaksa berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menyelamatkan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan barang publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta. Sayangnya, kebijakan yang ada sering kali tidak mencerminkan keadilan dan lebih mengutamakan keuntungan, sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat. Pengelolaan barang publik oleh pemerintah merupakan cerminan dari tanggung jawabnya terhadap warga. Jika pengelolaan barang publik lebih banyak dilakukan oleh swasta daripada negara, maka kemungkinan besar akses terhadap barang tersebut tidak akan gratis. Pemerintah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan-peraturan turunannya.

DAFTAR REFERENSI

- Wirawijaya, I. (2022). Teori Barang Publik Yang Sulit Diimplementasikan. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(2), 106-110.
- Maningsih, S. (2024). Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah, 1(1), 23-30
- Holcombe, RG (2000). Teori barang publik dan publik kebijakan. *Jurnal Penyelidikan Nilai*, 34, 273-286.
- Kallhoff, A. (2014). Mengapa masyarakat membutuhkan barang publik.
- Darnilawati, Fenny. (2015). Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Daerah. Pekanbaru: Konferensi Regional Administrasi Publik Se-Sumatera
- Mangkusubroto, Guritno. (2000), *Ekonomi Publik*. Edisi III. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkoesubroto, Guritno. 2011. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga* Cetakan ke-16. Yogyakarta, BPFE UGM Yogyakarta
- Djayasinga, Marselina. 2006. *Ekonomi Publik Suatu Pengantar*. Bandarlampung, Penerbit Universitas Lampung

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. 2010. Economics, 19th Edition. McGraw-Hill Education.

Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. 1989. Public Finance in Theory and Practice, Fifth Edition. McGraw-Hill Book Company. [Teori keuangan publik dan peran pemerintah]

Mankiw, N. G. (2012). Principles of Economics (6th ed.). South-Western Cengage Learning.

M.Khausaini (2019), Ekonomi publik - books.google.com